



Pilihan Profesi Hukum Mahasiswa dalam Pengembangan Kurikulum Fakultas Hukum

Sartono Sahlan✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui Mei 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:
Choice of Professions; Law Students; Curriculum Conservation

Abstrak

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran mempunyai peran sebagai dasar acuan pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kurikulum harus selalu mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pilihan profesi hukum mahasiswa hukum Unnes dan menemukan model pemetaan kurikulum FH Unnes sesuai dengan pilihan profesi hukum mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan teknik pengambilan data melalui angket dan observasi. Analisis data dilakukan secara interaktif analisis model yang diperkuat dengan statistik deskriptif dalam memaknai angket. Hasil penelitian ini menunjukkan pilihan profesi hukum yang banyak diminati mahasiswa adalah sebagai konsultan hukum, selanjutnya legal officer, dan berturut-turut advokat, jaksa, hakim dan terakhir mediator. Fakultas hukum berdasarkan hasil tersebut melakukan workshop kurikulum yang menghasilkan kurikulum kompetensi berbasis konservasi. Kurikulum ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang tepat dalam menjembatani pilihan profesi mahasiswa FH Unnes. Ada beberapa fakta yang harus dibenahi oleh FH Unnes dalam pelaksanaan kurikulum tersebut yaitu sarana prasarana harus memadai, dengan dosen yang profesional dan mempunyai komitmen keilmuan hukum yang tinggi.

Abstract

Curriculum as an important component in the learning process has a role as a basic reference for teaching and learning process. Therefore, it should always be able to adapt to the needs of the workforce and community development. This study aimed to describe the choice of the students legal profession and map the curriculum model according to the students choice of the legal profession. The approach used in this study is a socio-juridical, with techniques of data collection through questionnaires and observation. The result of this research indicated that the most favorite preference of legal profession as a legal consultant, followed by the legal officer, and respectively advocates, prosecutors, judges and mediators. And the majority of this profession choice is driven by our analysis of the legal needs of the people of Indonesia and the global situation and the corresponding ideals. Law schools based on the results of the workshop curriculum conduct competency-based curriculum that produces conservation. The curriculum is expected to be a catalyst in bridging the proper choice of profession Unnes FH students. There are some facts that should be addressed by Faculty of Law Unnes in the implementation of the curriculum that must be addressed infrastructure, with lecturers who are professional and have a high commitment to scientific laws.

✉Alamat korespondensi:
Gedung C4, Sekaran, Gunungpati,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229
E-mail: sartonosahlanfh@gmail.com

© 2013 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919 (cetak)
ISSN 2337-5418 (online)

1. Pendahuluan

Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata kuliah ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja (Arbi, 1988: 25).

Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh (Makmun, 1996: 56).

Kurikulum dan lamanya keberlakuan kurikulum juga menjadi bahan kajian di kurikulum perdosenan tinggi. Oleh karena itu pengembangan kurikulum dengan melakukan pemetaan kurikulum adalah hal keniscayaan harus ada. Kurikulum harus mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai pemakai tenaga ahli dari lulusan perguruan tinggi. Kurikulum harus menjadi katalisator pencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Jalal dan Supriyadi, 2001:67).

Faktanya banyak lulusan perguruan tinggi yang belum mampu terserap dunia kerja karena Mereka para lulusan tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Ironisnya banyak lowongan tenaga kerja yang tidak bisa terserap karena terbatasnya kualifikasi para sarjana. Kondisi ini harus dimaknai dengan melakukan pemetaan kurikulum di perguruan tinggi (Zamroni, 1992:90). Pemetaan Kurikulum adalah proses yang berkelanjutan dari mendokumentasikan data kurikuler melalui perencanaan unit yang terdiri dari kategori-kategori seperti konten, keterampilan, penilaian, kegiatan belajar/strategi instruksional, sumber daya, dan lain-lain. Dokumentasi data kurikuler dapat

dilakukan oleh dosen secara kolaboratif atau individu untuk semua program yang diajarkan dalam program kurikuler yang diberikan untuk tujuan menangkap gambaran lengkap dari kurikulum.

Fakultas Hukum Unnes mencetak para sarjana hukum yang harus mampu menjadi tenaga hukum ahli dibidangnya secara bertanggung jawab dengan mampu mencetak sarjana hukum yang ahli, profesional berkepribadian Pancasila dengan mengembangkan nilai-nilai konservasi. Profesi hukum antara lain adalah jaksa, polisi, pengacara, hakim, konsultan hukum, kantor hukum (*legal officer*) dan lain-lain. Permasalahannya adalah apakah sudah ada linieritas pemetaan kurikulum dengan pemetaan kepeminatan profesi hukum mahasiswa hukum Unnes. Kondisi ini perlu ada penelitian hukum terkait dengan pengembangan pemetaan kurikulum dengan peminatan profesi hukum mahasiswa hukum Unnes.

Fokus sekaligus sebagai rumusan masalah penelitian kelembagaan ini adalah: (1) Bagaimana peminatan profesi hukum mahasiswa Fakultas Hukum Unnes tahun akademik 2009 dan 2010?. (2) Bagaimana Pemetaan Kurikulum Fakultas Hukum Unnes berdasarkan Peminatan profesi hukum mahasiswa ? Tujuan penelitian secara kontekstual adalah: (1) Mendeskripsikan peminatan profesi hukum mahasiswa Fakultas Hukum Unnes tahun akademik 2009 dan 2010. (2) Menemukan Pemetaan Kurikulum Fakultas Hukum Unnes berdasarkan Peminatan profesi hukum mahasiswa.

2. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah *Constructivism (Legal Constructivism)* (Indarti, 2001: 36) pada konteks dan kontens substansi pemilihan profesi hukum mahasiswa FH Unnes (Salim, 2006: 34). Paradigma konstruktivis merupakan sebagai kritik terhadap ilmu sosial positivistic. Penelitian yang dilakukan kategori jenis penelitian hukum **juridis-sociologis**. Artinya berlakunya hukum harus sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi, atau

terbentuknya dengan cara- cara yang telah ditetapkan sekaligus untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan pada proses penegakan hukum (*law enforcement*) (Rodiyah, 2011:243).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik pada penelitian kualitatif *socio-legal research* (Soetandyo Wignjosebroto, 2002: 164). Pendekatan hermeneutik dipakai untuk menafsirkan pilihan profesi mahasiswa hukum Unnes dalam dalam menempuh prodi Ilmu ukum.

Lokasi Penelitian yang digunakan adalah Universitas Negeri Semarang, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum TA 2009 dan 2010. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian Fakultas Hukum untuk meliha dinamika peminatan profesi hukum dengan pangsa pasar dunia kerja. Metode yang digunakan wawancara, observasi, dokumen hukum dan instrumen pengumpulan data yang linier serta analisis data *interactive analysis models*.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Profil Responden Mahasiswa Fakultas Hukum

Responden penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2009/2010. Jumlah keseluruhan adalah 232. Melalui angket, mahasiswa diberi angket yang diperoleh ketika pembekalan PKL dilanjutkan dipersilahkan untuk membuka Web FH secara *on line*.

Angket yang disebar sebanyak 232 angket sesuai dengan jumlah mahasiswa, dan yang masuk di tim peneliti 180 angkat (mahasiswa) dengan jumlah Laki-laki: 144 dan Perempuan 66 sehingga berjumlah 180 mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan populasi karena survey yang akan menjadi data penting pengambilan keputusan kebijakan fakultas. Sumber data populasi menjadikan data penelitian lengkap sehingga tingkat kekeliruan pengambilan keputusan menjadi lebih sedikit. Keputusan fakultas dimaknai sebagai kebijakan publik yang harus mempunyai tingkat kebenaran tinggi linier dengan kondisi riil kebutuhan mahasiswa dalam memperkuat pencapaian kemampuan awal dalam meraih profesi yang diminati.

Ketersebaran mahasiswa berasal dari berbagai daerah dan propinsi di Indonesia antara lain dominasi Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Tegal, Pekalongan, Batang, Blora, Pati, Sragen, Klaten dan kabupaten kota lain yang ada di Jawa Tengah. Propinsi lain antara lain Jawa barat, DKI, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi sehingga mampu mewakili ketersebaran karakteristik daerah dengan peminatan profesi hukum yang diminati.

Kondisi ini menunjukkan tingkat variasi jawaban dan tingkat heterogenitas yang mampu menjelaskan bahwa data ini memenuhi tingkat penyebaran baik dan efektif

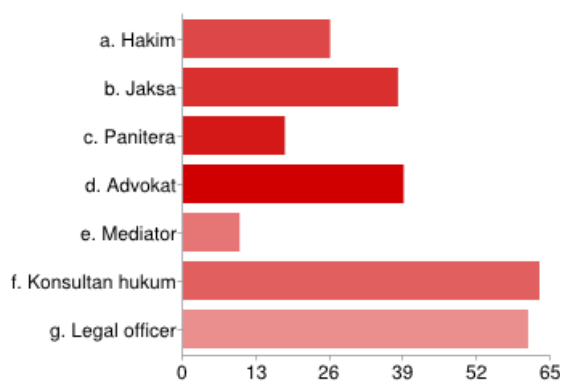
Tabel 1. Jumlah Data Mahasiswa Fakultas Hukum Yang Aktif

No	Angkatan	BIDK MISI	Jumlah
1	2005		15
2	2006		30
3	2007		69
4	2008		179
5	2009		232
6	2010	12	218
7	2011	22	308
8	2012		322
JUMLAH TOTAL			1373

Obyek penelitian pada Angkatan 2009/2010 dengan alasan Angkatan tersebut memberikan data yang lebih valid karena masuk semester tujuh (7) yang sudah memperoleh wawasan ilmu hukum selama tiga tahun dan akan KKN PKL selanjutnya membuat Skripsi. Fakta ini menjadi pertimbangan utama untuk menentukan peminatan profesi hukum.

b. Peminatan Profesi Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2009/ 2010 .

Hasil penelitian menunjukkan peminatan mahasiswa dalam memilih profesi hukum adalah :



Artinya:

Secara berturut-turut Mereka memilih profesi sebagai berikut:

a. Hakim	26	14%
b. Jaksa	38	21%
c. Panitera	18	10%
d. Advokat	39	22%
e. Mediator	10	6%
f. Konsultan hukum	63	35%
g. Legal officer	61	34%

Kondisi ini menunjukkan mahasiswa memilih profesi (tiga besar) pada konsultan hukum, legal officer dan advokat. Selanjutnya berturut-turut pada jaksa, hakim dan panitera. Berdasarkan peminatan inilah Kurikulum FH Unnes harus menyesuaikan muatan materi yang diberikan Penguatan Kepada Mahasiswa. Antara lain pada kemampuan tingkat analisis

yang tinggi karena tiga besar pilihan Mereka menuntut tingkat kemampuan analisis yang tinggi dan kuat

Aalasanya Mereka memilih profesi tersebut adalah:

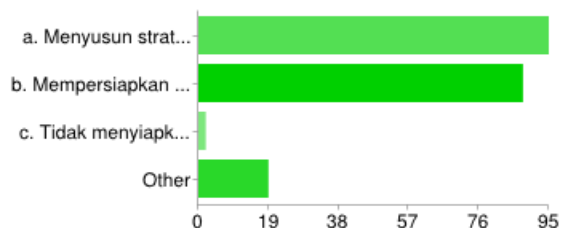


Artinya:

Alasan mereka memilih konsultan hukum, legal officer dan advokat adalah sesuai minat dan cita-cita (69%) dan terinspirasi tokoh yang dikagumi (40%). Kondisi ini menunjukkan tingkat keinginan pencapaian cita-cita yang tinggi berdasarkan identifikasi kodelling terhadap tokoh saat ini yang dikagumi. FH Unnes harus mempersiapkan kurikulum yang mampu mengaktualisasikan minat dan cita-cita mahasiswa secara operasional dan konstruktif membangun kemampuan analisis dan berpikir kearah filsafat hukum yang ber-Pancasila. Karena jika tidak berdasarkan Hukum Pancasila bisa berbahaya akan mengarah ke kapitalis, hal ini harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan di FH Unnes dan Unnes sendiri karena profesi pilihan mahasiswa Hukum menunjukkan pada profesi independen berpikir hukum yang bisa diarahkan pada keadilan substansi mensejahterakan atau bisa berbanding ter balik pada profesi ayng menguntungkan secara finansial tanpa peduli keadilan substansi yang mensejahterakan karena orientasi mahasiswa terengaruh oleh budaya kapitalis mauun hedonis global yang susah untuk difilter.

Dalam mempersiapkan pencapaian pilihan profesi hukum mahasiswa melakukan persiapan dengan matang penuh motivasi

yaitu :



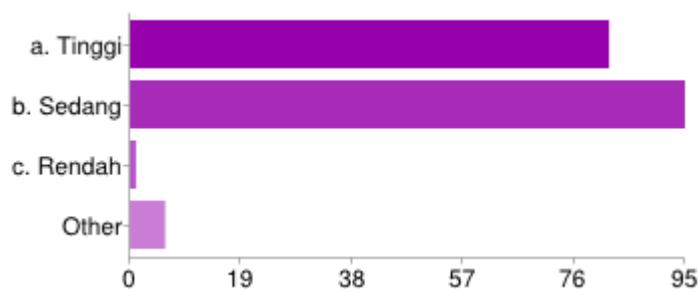
Artinya:

Mahasiswa mampu mempersiapkan diri untuk melakukan persiapan yang baik, konstruktif efektif efisien mencapai tujuan profesi yang diminati dengan melakukan:

a. Menyusun strategi belajar dan menyesuaikan situasi kondisi perkuliahan	95	53%
b. Mempersiapkan motivasi berprestasi dan belajar giat	88	49%
c. Tidak menyiapkan apa-apa yang penting kuliah saja setiap hari	2	1%
Other	19	11%

Kondisi ini menunjukkan tingkat kedewasaan mahasiswa hukum yang tinggi dalam menyiapkan strategi belajar dan situasi kondisi perkuliahan. Tugas selanjutnya yang harus disiapkan oleh para dosen adalah menyiapkan proses belajar mengajar yang multi interaktif berbasis pada konstekstal pembelajaran ilmu hukum yang berbasis pada media pembelajar ppt yang mampu mengoptimalkan fungsi bisa dengan movie, sound dan analisis kasus dari internet sesuai dengan pokok bahasan yang disamakan. Hal ini akan mengoptimalkan hasil belajar dan konsistensi mahasiswa dalam semangat belajar.

Kondisi kedisiplinan, ketekunan, semangat berprestasi dan kerjakeras saudara dalam memilih profesi menunjukkan:



Artinya kondisi kedisiplinan, ketekunan, semangat berprestasi dan kerjakeras saudara dalam memilih profesi tiga besar tadi menunjukkan kondisi yang :

a. Tinggi	82	46%
b. Sedang	95	53%
c. Rendah	1	1%
Other	6	3%

Hal ini memudahkan penyelenggaraan pendidikan di FH Unnes karena tingkat kedisiplinan, semangat belajar yang rerata tinggi (46%) dan sedang 53%.

Alasan Mereka antara lain : mereka secara umum masih dan sekuat tenaga untuk mampu mengatur jam belajar yang efektif. Ini dilakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan keinginan saya tentunya dengan restu dan doa kedua dari orang tua. Perjuangan saya untuk menjadi mahasiswa tidak mudah, begitu juga dengan orangtua saya yang sudah bekerja keras untuk membiayai kuliah saya. Sebagai anak pertama, saya harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik dan keluarga. Termasuk berbakti untuk negara sebagai bentuk pengamala ilmu. Hal ini menunjukkan kemampuan diri pada orangtua, keluarga dan juga untuk mampu hidup dimasa depan yang lebih baik. Berbakti kepada orangtua. Menunjukkan kemandirian kepada orangtua.

Beberapa langkah praktis yang Mereka lakukan adalah segera untuk mencapai cita-cita tersebut lebih ceat, tepat dan berprestasi adalah Mereka memberi alasan

ayang normatif baik yaitu: (1) mendekatkan diri pada Tuhan (2) belajar lebih giat (3) menjaga kesehatan dan pergaulan yang saya lakukan tentunya menjalin relasi sebanyak-banyaknya bagi teman, saudara maupun orang lain yang telah terlebih dahulu bekerja dibidang hukum dengan cara memperbanyak link agar mudah setelah wisuda, dan untuk itu pihak fakultas juga harus meyediakan link untuk kami agar dapat memperluas jaringan kerjasama nantinya melalui kerjasama antar lembaga dengan mahasiswa. (4) Setiap hari tentu harus produktif dalam berbagai hal positif. Tidak selalu hanya dalam bidang hukum. (5) Belajar hal-hal positif terutama mendukung sikap mental untuk menjadi

seorang profesional hukum dengan belajar ESQ dan juga ilmu agama yang baik.

c. Pemetaan Kurikulum Berdasarkan Peminatan Profesi Hukum Mahasiswa

Pemetaan kurikulum yang dilakukan Fakultas Hukum Unnes telah dilakukan pengkajian secara intensif melalui workshop. Workshop ini berdasarkan hasil analisis terjawabnya masalah pertama dalam penelitian ini, sekaligus kajian terhadap analisis kurikulum universitas yang berbasis kompetensi dan konservasi dan kajian kebutuhan masyarakat terhadap hukum global.

a. Identitas Program Studi

1 Nama	Program Studi : Ilmu Hukum S1
Izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin Penyelenggaraan: Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 4796/D/T/2004 Tanggal 16 Desember 2004 2. Ijin Perpanjangan: Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 398/D/T/2007 Tanggal 1 Maret 2007 3. Ijin Perpanjangan: Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 4129/D/T/K-N/2010 tanggal 28 Oktober 2010
Akreditasi	1. S.K BAN PT DEPDIKNAS NOMOR 025/BAN-PT/Ak-XII/S1/VIII/2009 Peringkat B (326) Tanggal 28 Agustus 2009.
Gelar	Sarjana Hukum (S.H.)
Deskripsi	Program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang profesional dan berkarakter. Menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2018
Visi	
Misi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan serta pengajaran berkualitas berbasis nilai-nilai konservasi. b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian serta publikasi bidang hukum. c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian hukum. d. Menjalni dan mengembangkan kerjasama tingkat nasional dan internasional.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki integritas kepribadian berdasarkan Pancasila. b. Menghasilkan sarjana hukum profesional dan berkarakter. c. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu mengabdikan ilmunya bagi pengembangan ilmu hukum, profesi hukum dan kesejahteraan masyarakat. d. Memperkuat jejaring kerjasama pada tingkat nasional dan internasional.

1. Profil Dan Kompetensi Lulusan

a. Profil Lulusan

- 1 Hakim
 - 2 Jaksa
 - 3 Panitera
 - 4 Advokat
 - 5 Mediator
 - 6 Konsultan Hukum
 - 7 Legal Officer.
- a. Hakim , yaitu profesi hukum sebagai penegak hukum dipengadilan yang memberikan penilaian proses pengadilan selanjutnya memberikan keputusan pengadilan. Hakim bernaung dalam Kementerian Hukum dan HAM. Hakim yang dimaksud yang ada di lingkungan pengadilan umum dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA.
 - b. *Jaksa*, yaitu penegak hukum wakil negara yang melakukan penuntutan dalam proses peradilan bernaung dalam Kementrian Hukum dan HAM.
 - c. *Panitera*, yaitu petugas yang melakukan proses pencatatan secara detail pada waktu proses persidangan.
 - d. *Legal drafter*, yaitu profesi hukum sebagai perancang hukum terkait perancangan perundang-undangan di Indonesia. Perancangan UU, Perda baik propinsi maupun kabupaten. *Legal drafter* ada pada departemen pemerintahan baik pusat maupun daerah.
 - e. *Corporate Lawyer*, yaitu profesi hukum yang tergabung dalam asosiasi pengacara. Mereka bekerja memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dan konsultasi baik profit maindet maupun non profit sesuai dengan UU Advokat.

- f. Aparatur Negara (Penegak Hukum), yaitu profesi hukum yang ada pada tiga pilar yaitu Jaksa, Hakim maupun kepolisian.
- g. Konsultan hukum, yaitu profesi hukum yang bertugas memberikan pendampingan layanan konsultasi hukum baik pidana, perdata, agraria, pertanahan, lingkungan dan sebagainya.
- h. *Legal Educator* , yaitu profesi hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan hukum di perguruan tinggi yaitu sebagai dosen fakultas hukum.

b. Kompetensi Lulusan

- 1 Kompetensi Utama
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum, struktur hukum dan metodologi hukum untuk penulisan karya ilmiah
 - b. Menguasai dan memahami sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan hukum material.
 - c. Memiliki kemampuan dan kemahiran untuk memecahkan berbagai persoalan hukum.
 - d. Memiliki sikap dan perilaku sebagai profesional yang religius, jujur, adil, bertanggungjawab, humanis, peduli, kritis, responsif dan progresif dan berkepribadian Pancasila.
- 2 Kompetensi pendukung
 - a. Memiliki pengetahuan tentang karakteristik masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat global.
 - b. Memiliki jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan dalam perlindungan HAM.
 - c. Memiliki jiwa, semangat dan perilaku berbasis konservasi

- 3 Kompetensi lain
- Memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing
 - Memiliki kemampuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - Memiliki kemampuan kepemimpinan

Kompetensi Utama, Pendukung dan Kompetensi lainnya harus disusun bergayut jenjang dalam integrasi kurikulum konservasi. Artinya kurikulum ini disusun untuk mencapai kompetensi tersebut secara berjenjang dari mulai kompetensi utama yang selanjutnya

kompetensi utama tersebut dioperasionalkan dalam kompetensi pendukung dan lainnya dalam keterpaduan ketiganya bersinergis mencapai kompetensi kurikulum konservasi Universitas Negeri Semarang.

d. Matriks Profil dan Kompetensi Lulusan

Matrik dibawah ini menunjukkan profil lulusan menjadi cermin dalam merumuskan kompetensi utama, kompetensi penunjang dan kompetensi lainnya. Hal ini untuk menunjukkan keterkaitan secara operasional kompetensi yang harus dimiliki dengan profil lulusan yang dicapai melalui pencapaian kemampuan dasar mahasiswa hukum untuk mampu melakukan profesi hukum tersebut.

Profil/Peranan Lulusan	Kompetensi Yang Seharusnya dimiliki
a. Hakim b. Jaksa c. Panitera d. Advokat e. Mediator f. Konsultan Hukum g. Legal Officer	A. Kompetensi Utama <ol style="list-style-type: none"> 1) Menguasai dasar-dasar ilmu hukum, struktur hukum dan metodologi hukum untuk penulisan karya ilmiah 2) Menguasai dan memahami sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan hukum material 3) Memiliki kemampuan dan kemahiran untuk memecahkan berbagai persoalan hukum 4) Memiliki sikap dan perilaku sebagai profesional yang religius, jujur, adil, bertanggungjawab, humanis, peduli, kritis, responsif dan progresif dan berkepribadian Pancasila
	B. Kompetensi Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki pengetahuan tentang karakteristik masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat global. 2) Memiliki jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan dalam perlindungan HAM 3) Memiliki jiwa, semangat dan perilaku berbasis konservasi
	C. Kompetensi Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing 2) Memiliki kemampuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3) Memiliki kemampuan kepemimpinan

**e. Matrik Rumusan Kompetensi ,
Elemen Kompetensi**

Pembentukan kurikulum harus berdasarkan pada penjenjangan yang diatur dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum.

Kompetensi yang harus dirumuskan adalah Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Lainnya (Sadiman, 2001: 34).

Kelompok Kompetensi	Rumusan Kompetensi	Elemen Kompetensi				
		1	2	3	4	5
1 Kompetensi Utama	1. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum, struktur hukum dan metodologi hukum untuk penulisan karya ilmiah		√	√	√	
	2. Menguasai dan memahami sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan hukum material	√	√		√	√
	3. Memiliki kemampuan dan kemahiran untuk memecahkan berbagai persoalan hukum	√	√	√	√	√
	4. Memiliki sikap dan perilaku sebagai profesional yang religius, jujur, adil, bertanggungjawab, humanis, peduli, kritis, responsif dan progresif dan berkepribadian Pancasila	√		√	√	√
2 Kompetensi Pendukung	1. Memiliki pengetahuan tentang karakteristik masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat global.		√	√		√
	2. Memiliki jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan dalam perlindungan HAM	√			√	√
	3. Memiliki jiwa, semangat dan perilaku berbasis konservasi	√			√	√
3 Kompetensi Lain	1. Memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing		√	√	√	√
	2. Memiliki kemampuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		√	√	√	
	3. Memiliki kemampuan kepemimpinan		√	√	√	

Keterangan Elemen Kompetensi

1. Landasan Kepribadian
2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
3. Kemampuan Berkarya
4. Sikap dan perilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasainya
5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

f. Pembinaan Pendukung Pelaksanaan PBM di Fakultas Hukum Unnes.

Menurut 72% mahasiswa, sarana prasarana FH Unnes belum memadai yaitu dalam dari hasil analisis menunjukkan kebutuhan mereka adalah 1. Ruang 2. penyejuk ruangan 3. tenaga dosen pengajar 4. tempat parkir 5. LCD (proyektor) yang kadang mudah error dan tidak pas fokus penempatannya pada dinding sehingga ketika ditampilkan slide ada beberapa tulisan yang tidak bisa di baca 6. alat-alat musik untuk keperluan event tertentu 7. GSG (Gedung Serba Guna) (usulan) 8. ruangan-ruangan yang kemungkinan akan digunakan untuk mahasiswa berpraktek (misal : ruang sidang untuk praktek kuliah hukum acara) gedung, ruang praktek, toga, contoh berkas. penyaluran bakat dan minat dalam profesi hukum (9). Gedung perkuliahan, ruang pertemuan, (10) ruang pelayanan TU, (10) ruang bimbingan, (11) Ruang Layanan Pimpinan.

Mahasiswa 72% menginginkan penambahan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah profesi keacaraan termasuk profesionalitas dalam acara PTUN dan MK. Konsekuensinya Fakultas Hukum harus segera melakukan evaluasi penambahan jumlah dosen untuk matakuliah tertentu. Dengan melakukan seleksi yang sesuai kompetensi dosen yang disyaratkan oleh UU Guru dan Dosen (UU No. 5 Tahun 2005). Dosen fakultas hukum harus mempunyai kompetensi yang lebih spesifik lengkap dari petunjuk UU tersebut antara lain harus mempunyai komitmen awal yang konstruktif membangun FH, pemahaman hukum Pancasila yang benar, Semangat bekerja keras, beretika dan bermoral yang baik sesuai kepatutan publik, dari manapun tidak menjadi parameter yang penting adalah kompetensi dan spesifikasi nilai moral konservasi yang dimiliki.

Secara umum harapan mahasiswa adalah : (1) FH Unnes yang pertama dan utama berakreditasi A, (2) gedung dan kelengkapan prasarana lain yang mendukung meliputi ruang perpustakaan yang besar dan nyaman ruang bagi mahasiswa organisasi,(3) diharapkan pihak fakultas banyak menjalin

kerjasama yan mana selalu sedia menampung bakat dan minat mahasiswanya agar senantiasa mendapatkan pengalaman bukan hanya waktu kita praktek kerja lapangan saja. dengan menajukan seleksi terlebih dahulu agar mahasiswa termotivasi, (4) Mendukung prestasi mahasiswa tanpa terkurung hanya dalam ruang lingkup hukum saja, (5) Dosen mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengajar dan sabar membimbing dalam segala hal kegiatan akademik, (6) dosen cerdas dengan mampu membuat rencana pembelajaran yang baik dan mempunyai buku ajar sendiri, (7) dosen obyektif dalam penilaian dan selalu berbasis pada kemampuan dalam penguasaan kompetensi matakuliah, (8) dalam berpenampilan yang menunjukkan dosen yang smart berwibawa tidak asal-asalan.

4. Simpulan

Peminatan profesi hukum mahasiswa Fakultas Hukum Unnes tahun akademik 2009 dan 2010 adalah pada profesi hukum (tiga besar) sebagai konsultan hukum, legal officer dan advokat. Selanjutnya berturut-turut pada jaksa, hakim dan panitera.

Pemetaan Kurikulum Fakultas Hukum Unnes berdasarkan Peminatan profesi hukum mahasiswa tersebut melakukan workshop dengan pemetaan pada kemampuan analisis dan solusi masalah hukum kuat berdasarkan sikap moral profesi hukum yang mengadopsi nilai-nilai konservasi.

Sarana prasarana menjadi hal urgent segera diwujudkan keternademadahi dan dibenahi terutama gedung sarana kuliah, perpustakaan, mimbar akademik kreativitas dan diskusi ilmiah mahasiswa dan dosen harus memadai dalm jumlah maupun kualitas yang mendukung pilihan profesi mahasiswa.

Berdasarkan peminatan profesi hukum mahasiswa Fakultas Hukum Unnes tahun akademik 2009 dan 2010 maka dianjurkan FH Hukum memperkuat pada kemampuan analisis dan solusi masalah hukum dengan melakukan rencana tindak (*action plan*) dalam melakukan *capacity building* SDM secara optimal.

Pemetaan Kurikulum Fakultas Hukum Unnes berdasarkan Peminatan profesi hukum mahasiswa dianjurkan segera direalisasikan dengan mengoptimalkan SDM dan Sumber Daya lainnya. Semua komponen kurikulum harus dioptimalkan untuk mampu melaksanakan secara operasional praktis kurikulum FH Unnes berbasis konservasi.

Fakultas hukum dianjurkan untuk melakukan pengangkatan dosen kontrak maupun dosen luar biasa dari praktisi pengacara, legal officer maupun lembaga konsultasi Hukum. Hal itu secepatnya dilakukan untuk memperkuat Tim pengajar mata kuliah acara yang menjadi kebutuhan memperkuat pilihan profesi mahasiswa. Fakultas Hukum Unnes secara sistematis dianjurkan untuk segera mampu memenuhi harapan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan juga memenuhi sarana prasarana dan kuantitas dan kualitas jumlah dosen.

Daftar Pustaka

- Indarti, Erlyn, *Legal Konstruktivisme: Paradigma Baru Pendidikan dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Vol XXX No. 3 Tahun 2001.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Makmun, Abin Syamsudin.1996. *Analisis Posisi Pendidikan*. Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud.
- Rodiyah, 2011. *Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Perda (Studi Kasus Pembentukan Perda Bidang Pendidikan Dalam Perspektif Socio-Legal)*. Disertasi-PDIH Undip-Semarang.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.Yogyakarta: UGM Press.
- Sutan Zanti Arbi.1988. *Pengantar kepada Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo,.2002, "*Hukum, Metode, dan Dinamika Masalahnya* " ELSAM – HUMA, Jakarta.
- Zamroni, 1992. *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta : Tiara Yoga.
- ,2001. *Pendidikan untuk Demokratisasi, Tantangan Menuju Civil Society*, Jogjakarta: Bigraf Publishing.